

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengisi pembangunan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kualitas sumber daya manusianya sedini mungkin agar secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat maju secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sekitar sesuai dengan potensi yang dimiliki (KEMENDIKBUD RI, 2017) .

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyatakan bahwa jalur pendidikan kejuruan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang dapat terserap oleh dunia kerja, sebab materi teori dan praktek telah diberikan sejak pertama masuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan harapan kompetensi yang dimiliki lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK seharusnya mampu menguasai kompetensi yang berhubungan dengan lingkungannya. Hal itu berguna karena objek paling dekat lulusan SMK setelah lulus adalah lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar tersebut yaitu potensi unggulan wilayah. (Direktorat Pembinaan SMK RI, 2017, hlm.11).

Potensi wilayah berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya bagi wilayah bersangkutan maupun dalam kaitan dengan hubungan antarwilayah. Potensi daerah merupakan kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan suatu daerah untuk menghasilkan nilai ekonomi dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Potensi yang ada pada suatu daerah dapat berupa potensi sumber daya alam, potensi sosial budaya, dan potensi sumber daya manusia yang apabila dimanfaatkan dan dikembangkan akan memberikan manfaat bagi manusia. Potensi wilayah ditujukan dengan melihat kontribusi berbagai sektor/komoditas ekonomi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu wilayah. Semakin besar kontribusi suatu

sektor/komoditas dibandingkan dengan sektor/komoditas lainnya menunjukkan keunggulan suatu sektor pada wilayah tersebut.

Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing wilayah dan perkembangan Kabupaten Bandung Barat. Potensi-potensi tersebut antara lain (1) potensi industri terdapat di Kecamatan Padalarang (2) potensi agrowisata di Kecamatan Parongpong, (3) Lokasi Kecamatan Padalarang yang sangat strategis karena berada di lingkaran Tol Cipularang sehingga memiliki kemudahan akses ke Jakarta dan Purwakarta; (4) potensi pariwisata di Kecamatan Lembang seperti kawasan wisata Maribaya, Gunung Tangkuban perahu, dan lain-lain (5) potensi pertanian antara lain di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong; serta (6) potensi Waduk Saguling dan Cirata yang dapat digunakan untuk sumber energi listrik (PLTA), untuk pengairan pertanian serta lokasi pariwisata. (BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung Barat, 2019)

Dilihat dari enam potensi tersebut, potensi pertanian di Kabupaten Bandung Barat cukup besar yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan), pekebunan, perikanan dan peternakan. Potensi pertanian yang mendukung ini menjadikan pertanian menjadi salah satu bahan baku utama untuk beberapa sektor ekonomi lainnya termasuk sektor industri pengolahan yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini karena industri pengolahan merupakan sektor yang paling banyak mendistribusikan nilai terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat yakni berdasarkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga konstan pada tahun 2018 sebanyak 6,10%. Sementara berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 industri pengolahan mendominasi menjadi sektor ekonomi unggulan dengan andil sebesar 39,12%.

Perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Bandung Barat ini tidak terlepas dari dukungan potensi sumber daya alam yang menjadi potensi ekonomi daerah salah satunya potensi pertanian. Sehingga industri pengolahan yang menjadi unggulan adalah Industri Agro atau Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP). Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat, Industri Pengolahan Hasil

Pertanian (IPHP) yang paling unggul adalah pertama industri pengolahan susu; kedua industri pengolahan kopi; dan ketiga industri pengolahan teh. Hal ini diperkuat dengan temuan data produksi susu menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang menunjukkan Kabupaten Bandung Barat menjadi wilayah paling banyak memproduksi susu sebesar 116.140.337 liter/tahun.

Tabel 1. 1
Produksi Susu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Kabupaten/Kota		Susu (Liter)
Kabupaten		
1.	Bogor	15.273.785
2.	Sukabumi	7.816.638
3.	Cianjur	5.669.899
4.	Bandung	63.226.050
5.	Garut	33.152.194
6.	Tasikmalaya	4.941.083
7.	Ciamis	235.452
8.	Kuningan	15.313.087
9.	Cirebon	190.523
10.	Majalengka	1.681.262
11.	Sumedang	19.943.639
12.	Indramayu	122.086
13.	Subang	2.542.256
14.	Purwakarta	-
15.	Karawang	17.441
16.	Bekasi	180.222
17.	Bandung Barat	116.140.337
18.	Pangandaran	-
Kota		
1.	Bogor	1.462.800
2.	Sukabumi	319.749
3.	Bandung	2.089.998
4.	Cirebon	2.907
5.	Bekasi	127.015
6.	Depok	1.415.618
7.	Cimahi	1.835.370
8.	Tasikmalaya	619.151
9.	Banjar	-
Jumlah		294.318.562

Sumber : Dinas Peternakan Jawa Barat, 2018

Namun meskipun industri pengolahan menjadi sektor perekonomian unggulan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan nilai tambahnya terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat, permasalahan yang ditemui adalah industri pengolahan masih berada pada kategori sektor non basis pada tiga tahun terakhir. Adapun pada tahun 2018 berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) nilai industri pengolahan kurang dari angka 1 yakni hanya sebesar 0,98. Sebagaimana menurut Arifin (2010) yang mengartikan bahwa sektor non basis merupakan sektor yang kurang potensial karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayahnya sendiri.

Dengan demikian, salah satu upaya yang bisa dilakukan agar industri pengolahan menjadi kategori sektor basis baru artinya merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada tahun yang akan datang, maka salah satunya dengan memanfaatkan sektor pertanian yang merupakan sektor basis sebagai bahan baku dalam proses industri pengolahan dalam hal ini disebut industri pengolahan hasil pertanian atau industri agro dengan kategori peternakan yakni industri pengolahan susu menjadi fokus utama dalam meningkatkan nilai sektor ekonomi tersebut.

Adapun upaya peningkatan potensi bidang Industri Pengolahan Hasil Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu tersebut harus disertai dengan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya lulusan SMK yang terampil dan memiliki kemampuan dalam mengelola hasil pertanian kategori produksi hasil hewani tersebut. Program Keahlian SMK yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu tersebut adalah Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian.

Lulusan SMK wajib memiliki kompetensi sesuai dengan potensi unggulan wilayahnya agar mampu menjadi pencipta lapangan kerja dalam keberagaman potensi unggulan wilayahnya. Pentingnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penghasil lulusan yang memiliki keterampilan pada bidang tertentu, baik untuk bekerja di industri maupun berwirausaha (UU Nomor 20 Tahun 2003) akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di antaranya melalui kemampuan dalam mengelola potensi-potensi di wilayahnya.

Namun pada faktanya, penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum sepenuhnya sesuai dengan potensi wilayah, di mana berdasarkan data dari Dinas Provinsi Jawa Barat, SMK dengan program keahlian agribisnis dan agroteknologi pertanian hanya terdapat 7 kelompok yang tersebar di 4 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta di Kabupaten Bandung Barat, berbeda sangat jauh dengan jurusan dengan program keahlian lainnya yakni 82 kelompok bidang Teknik Komunikasi dan Informasi, 68 kelompok bidang Bisnis dan Manajemen, 120 kelompok bidang Teknologi dan Rekayasa, 41 kelompok bidang Pemasaran dan Perhotelan Pariwisata, 27 kelompok bidang Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, 6 kelompok bidang Seni dan Ekonomi Kreatif dan 7 kelompok agribisnis dan agroteknologi pertanian dan peternakan.

Tinggi rendahnya penyelenggaraan bidang keahlian SMK di atas berdampak pada *surplus* dan *deficit* untuk *output* program-program dengan jenis keahlian tertentu. *Surplus* dan *deficit* jumlah *output* (lulusan) ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan terjadinya urbanisasi. Seperti berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki tingkat pengangguran terbuka terbanyak di Kabupaten Bandung pada tahun 2018 yakni sebanyak 21,20 persen. Hal ini lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2
*Tingkat Penganggur Terbuka di Kabupaten Bandung Barat
Menurut Pendidikan Tahun 2016-2018*

Pendidikan	Tahun		
	2016	2017	2018
SD	3,17	4,40	7,58
SMP	9,36	14,68	6,53
SMA Umum	11,43	13,91	10,42
uSMA Kejuruan	17,80	16,34	21,20
Diploma I/II/III/Akademi	8,80	10,53	11,28
Universitas	11,25	13,07	9,57
Jumlah	10,30	12,15	11,09

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, 2018

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia bahwa diinstruksikan untuk menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job tittle*) dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK, menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi dan waktu, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL (Program Kerja Lapangan) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, serta mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur.

Namun, yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Bandung Barat khususnya pada program keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian saat ini terdapat permasalahan yakni masih sangat terbatasnya lulusan SMK yang terserap oleh dunia usaha dan industri (DUDI). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Program Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang Kabupaten Bandung Barat, beliau menyatakan bahwa “Lulusan dari SMK bidang pertanian masih belum terserap ke industri dikarenakan industrinya sendiri yang tidak membuka banyak lapangan kerja untuk lulusan SMK, mereka biasanya lebih memilih lulusan S1, padahal Sekolah sudah berupaya menjalankan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai misalnya kurikulum kami sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi, kemudian sudah ada berbagai kerjasama dengan beberapa industri guna menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan industri meskipun masih terkendala pada sarana dan prasarana Sekolah sebagai penunjang dalam praktek yang masih kurang”.

Maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa langkah kebijakan di antaranya menganalisis kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang didasarkan pada potensi-potensi wilayah sehingga dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri pengolahan hasil pertanian khususnya di Kabupaten Bandung Barat pada masa depan. Hal ini berhubungan dengan perencanaan pendidikan seperti apa yang

seharusnya dilakukan agar sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat sehingga menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh wilayahnya sendiri.

Somantri (2014) menyatakan bahwa kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat dewasa ini, seperti masalah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, masalah lingkungan dan adanya keterbatasan sumber daya alam. Sejak beberapa tahun lalu, Coombs (1968) dan Manap (1999, 2008) menghimbau agar pendidikan direncanakan secara seksama. Caranya dengan melihat pada keterbatasan yang ada dan diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Adapun analisis kebutuhan Sekolah dimaknai oleh John McNeil (dalam Sanjaya, 2008) dengan mendefinisikan analisis kebutuhan (*need assessment*) sebagai proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Sejalan dengan pendapat McNeil, Seel dan Glasgow (dalam Sanjaya, 2008) menjelaskan tentang analisis kebutuhan bahwa kebutuhan itu pada dasarnya adalah kesenjangan (*discrepancies*) antara apa yang telah tersedia dengan apa yang diharapkan, dan *need assessment* adalah proses mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan untuk dipecahkan. Ada beberapa hal yang melekat pada pengertian *need assessment*, baik yang dikemukakan McNeil maupun Glasgow yakni:

Pertama, merupakan suatu proses artinya ada rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan *need assessment*, dan bukan merupakan suatu hasil, akan tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan tertentu. Kedua, kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan demikian, *need assessment* itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kesenjangan yang seharusnya dimiliki dengan apa yang telah dimiliki.

Sehingga dapat disimpulkan menurut Sa'ud dan Makmun (2005) bahwa proses analisis merupakan tahap pertama dalam perencanaan pendidikan. Kajian ini sangatlah penting, karena dapat mengidentifikasi kesenjangan (*gaps*) dan ketimpangan (*disparities*) antara harapan dan kenyataan yang dalam hal ini membutuhkan pemecahan melalui program-program pembangunan yang terarah sasaran bidang garapannya (Sa'ud dan Makmun, 2005).

Untuk meningkatkan keakurasian dalam menganalisis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat digunakan dengan pendekatan *Manpower Planning*. Menurut Sa'ud dan Makmun (2005) alternatif pendekatan perencanaan pendidikan dalam Pendekatan Kebutuhan Ketenagakerjaan (*Manpower Planning*) mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki. Pendekatan Kebutuhan Ketenagakerjaan (*Manpower Planning*) ini bertujuan mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan penyediaan fasilitas dan pengarahan arus murid benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja.

Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini didasarkan oleh masih rendahnya lulusan SMK Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian yang terserap di Dunia Usaha dan Industri (DUDI). Penelitian ini diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil pertanian sub sektor industri pengolahan susu sehingga mampu mendorong perkembangan industri pengolahan terutama industri pengolahan hasil pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *manpower planning*, dengan potensi daerah di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan kebaruan penelitian. Hasil integrasi tersebut menghasilkan *demand* tenaga kerja untuk lulusan SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian disertai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan industri pengolahan hasil pertanian sub sektor industri pengolahan susu di Kabupaten Bandung Barat pada masa depan yakni berdasarkan fokus penelitian pada tahun 2018-2022. Adapun perencanaan pendidikan dapat dibedakan atas perencanaan jangka panjang yaitu meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun antara 11-30 tahun, perencanaan jangka menengah yaitu mencakup kurun waktu pelaksanaan antara 5-10 tahun dan perencanaan jangka pendek yaitu yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang

dari lima tahun antara 1-4 tahun (Nur'aedi, 2016). Sehingga penelitian ini menggunakan perencanaan pendidikan jangka menengah dengan mempertimbangkan tren di masa lalu untuk menganalisis kebutuhan Sekolah dengan proyeksi *manpower planning*. Kemudian, hasil analisis tersebut digunakan untuk menganalisis kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai upaya mengantisipasi akselerasi kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan hasil pertanian juga upaya meningkatkan nilai tambah pada industri pengolahan susu yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan identifikasi masalah, temuan-temuan yang diperoleh, fakta empirik, studi dokumentasi dan penelitian pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Berdasarkan Pendekatan *Manpower Planning* di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022 (Studi Kasus pada Sub Sektor Industri Pengolahan Susu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa masalah dan judul penelitian ini adalah “Analisis Kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Berdasarkan Pendekatan *Manpower Planning* di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022 (Studi Kasus pada Sub Sektor Industri Pengolahan Susu)”.

Dari permasalahan dan judul tersebut dapat ditarik sebuah pertanyaan yang dijadikan dasar dan acuan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian berdasarkan pendekatan *manpower planning* dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian sub sektor industri pengolahan susu di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018-2022?”**. Sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan tersebut, disusunlah rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana potensi pertumbuhan Agroindustri Pengolahan Hasil Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022?
2. Seberapa besar kebutuhan tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan program keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dengan pendekatan *manpower planning* pada Agroindustri Pengolahan Hasil Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu di Kabupaten Bandung Barat untuk lima tahun mendatang periode tahun 2018-2022?
3. Bagaimana gambaran umum kondisi *existing* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dalam mengantisipasi akselerasi kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan Agroindustri Pengolahan Hasil Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu di Kabupaten Bandung Barat untuk lima tahun mendatang periode tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: **“Menganalisis kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian berdasarkan pendekatan *manpower planning* dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian sub sektor industri pengolahan susu di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018-2022?”**. Sebagai upaya dalam menganalisis kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian tersebut, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus diantaranya :

1. Mendeskripsikan potensi pertumbuhan Agroindustri Pengolahan Hasil Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022.
2. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan program keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dengan pendekatan *manpower planning* pada Agroindustri Pengolahan Hasil

Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu di Kabupaten Bandung Barat di Kabupaten Bandung Barat untuk lima tahun mendatang periode tahun 2018-2022.

3. Mendeskripsikan gambaran umum kondisi *existing* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Kabupaten Bandung Barat.
4. Mendeskripsikan kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dalam mengantisipasi akselerasi kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan Agroindustri Pengolahan Hasil Pertanian sub sektor Industri Pengolahan Susu di Kabupaten Bandung Barat untuk lima tahun mendatang periode tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk peneliti maupun untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun beberapa manfaat yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian *Manpower Planning* dalam ilmu administrasi pendidikan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis di masa depan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan salah satunya di bidang ekonomi sebagai pertimbangan dalam mengembangkan sektor industri pengolahan di Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menganalisis kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar relevan dengan kebutuhan dunia industri di masa depan.
 - c. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian penelitian ini dapat

digunakan untuk mengembangkan program keahlian dengan fokus pertanian dan agribisnis.

- d. Bagi Mahasiswa, dapat digunakan sebagai dasar membuat penelitian lebih mendalam untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2018 mengenai struktur organisasi skripsi dalam mempermudah dan mengetahui garis besar dari isi skripsi setiap babnya, adapun struktur organisasi skripsi ini adalah :

1. Bab I Pendahuluan yang menjadi bab perkenalan. Struktur bab pendahuluan adalah latar belakang yang memaparkan konteks penelitian yang dilakukan; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat/signifikasi penelitian yang memberikan gambaran nilai lebih yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan; serta struktur organisasi yang berisikan tentang isi dari setiap bab skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka berisikan teori-teori dalam skripsi memberikan konteks yang lebih jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian; penelitian terdahulu dalam konteks yang sama; serta kerangka pikir dari penelitian.
3. Bab III Metodologi Penelitian bagian yang bersifat prosedural menjelaskan tentang desain penelitian; partisipan dan tempat penelitian; pengumpulan data yang menjelaskan secara rinci jenis data yang diperlukan dan instrument apa yang digunakan dan tahapan-tahapan teknik pengumpulan datanya; dan analisis data yang menjelaskan secara rinci dan jelas langkah-langkah yang ditempuh setelah data berhasil dikumpulkan.
4. Bab IV Hasil Dan Pembahasan yang menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan perumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab pembahasan.
6. Daftar Pustaka yang berisi referensi yang dipakai sebagai sumber dan atau kutipan dalam penyusunan skripsi.